

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap entitas, perusahaan atau organisasi harus memiliki pengelolaan manajemen yang baik agar tujuan yang ingin dicapai oleh entitas atau perusahaan dapat tercapai. Pengelolaan manajemen perusahaan yang baik adalah dengan mengolah informasi-informasi yang diperoleh dan dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan yang didasarkan oleh informasi yang tepat dan akurat.

Sistem akuntansi adalah suatu metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi dan kondisi keuangan yang dibutuhkan bagi manajemen perusahaan. Macam-macam sistem akuntansi yang ada di perusahaan meliputi sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, dan lain-lain.

Sistem akuntansi penggajian adalah suatu sistem, prosedur, dan catatan-catatan yang digunakan untuk menetapkan secara tepat dan teliti, jumlah gaji yang harus diterima oleh setiap karyawan, jumlah yang harus dipotong dari gaji itu untuk pajak penghasilan serta sisa gaji yang benar-benar dibayarkan kepada karyawan (Mulyadi, 2001:373). Apabila perusahaan sudah ada sistem akuntansi penggajian yang baik, maka diharapkan perusahaan memiliki praktik yang sehat seperti, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi tenaga kerja langsung, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah (Mulyadi, 2001:387).

Tujuan sistem akuntansi penggajian adalah untuk memastikan bahwa status, tarif pembayaran atau gaji, dan pengurangan bayaran telah diotorisasi (Wilkinson, 1995:196).

Suatu perusahaan diharapkan mempunyai sistem akuntansi penggajian yang baik karena untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Pencegahan penyelewengan dapat dilakukan dengan adanya pemisahan tugas atau fungsi pencatatan, memberlakukan praktek-praktek yang sehat dalam sistem akuntansi penggajian, misalnya menggunakan presensi dengan sidik jari. Dengan adanya pembaharuan peraturan mengenai gaji pokok pegawai negeri sipil dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang membahas tentang perubahan nominal gaji pokok pegawai pemerintahan, maka saya memutuskan untuk melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto.

BPKPD Kota Mojokerto merupakan salah satu unit organisasi atau lembaga yang bertugas membantu walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan telah lama berdiri maka dari itu instansi tersebut harus memiliki pengelolaan dalam hal sistem akuntansi yang baik. BPKPD Kota Mojokerto seharusnya memiliki sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang transparan, dan akuntabel maka sistem akuntansi penggajian dan pengupahan harus mendapat perhatian yang baik. Dengan adanya perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 diharapkan adanya peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan para pegawai negeri sipil, karena itu dibutuhkan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang baik dan transparan agar terciptanya kepuasan kepada para pegawai negeri sipil yang berdampak pada peningkatan hasil kinerja para pegawai yang semakin membaik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya memandang sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh BPKPD

Kota Mojokerto sangat penting. Dimana pemerintah Kota Mojokerto sejak tahun 2016 telah menerapkan sistem *e-payment* untuk semua penggajian dan pembayaran diatas Rp 2.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), sedangkan untuk semua penggajian dan pembayaran dibawah Rp 2.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) melalui juru bayar. Maka saya tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang sistem akuntansi penggajian yang digunakan oleh BPKPD Kota Surabaya dengan judul Sistem Akuntansi Penggajian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto.

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Adapun tujuan studi lapang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dalam sistem akuntansi penggajian di BPKPD Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang dipakai dalam sistem akuntansi penggajian di BPKPD Kota Mojokerto

## **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Instansi BPKPD Kota Mojokerto

Penulis berharap agar nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan oleh BPKPD Kota Mojokerto sebagai saran dan kritik yang bersifat membangun serta menjadi sumber masukan dalam meningkatkan kinerja di lingkungan instansi BPKPD Kota Mojokerto.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem akuntansi penggajian serta sebagai pembandingan antara teori yang penulis dapatkan semasa perkuliahan dengan didunia kerja.

### 3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi pembelajaran dan wawasan atau sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Penggajian pada Sistem Akuntansi Penggajian.

## 1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Agar pembahasan tidak menyimpang penulis melakukan pembatasan permasalahan. Ruang lingkup pembahasan dalam laporan tugas akhir ini meliputi 2 prosedur dalam sistem penggajian yang digunakan di BPKPD Kota Mojokerto.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu proses memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada pemberi informasi. Dalam metode ini, data diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pegawai BPKPD Kota Mojokerto yang menangani dan mengetahui tentang sistem akuntansi penggajian di BPKPD Kota Mojokerto.
2. Dokumentasi, pengolahan data dengan cara meminta data dari laporan dan catatan milik BPKPD Kota Mojokerto yang berhubungan dengan sistem akuntansi penggajian.